

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang saya buat di bab sebelumnya, maka saya menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Tidak ada nya penjelasan yang jelas mengenai kriteria ujaran kebencian di dalam pasal 156 KUHP maupun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- 2) Peserta pemilihan kepala daerah yang melakukan delik ujaran kebencian dapat dituntut berdasarkan pasal sesuai dengan pada saat melakukan delik ujaran kebencian.
- 3) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran kebencian diluar kegiatan kampanye maka akan dikenakan pasal 156 KUHP dan pasal 310 KUHP
- 4) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran kebencian dalam lingkup kegiatan kampanye maka akan dikenakan adalah pasal 69 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 5) Apabila peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran kebencian pada saat kegiatan kampanye maupun diluar kampanye dengan menggunakan sarana informasi dan teknologi elektronik maka akan dikenakan pasal Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Tekonolgi Elektronik)

5.2.Saran

Berdasarkan analisis yang saya buat di bab sebelumnya, maka saya akan memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Perlu ada nya peraturan yang lebih jelas mengenai kriteria ujaran kebencian agar para peserta pemilihan kepala daerah mengerti dalam berkomentar maupun berkampanye tidak terkena delik ujaran kebencian.
- 2) Perlu ada nya sosialisasi dari penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam memberikan pengetahuan mengenai ujaran kebencian.

Daftar Pusaka

Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grasindo, Jakarta. 2000

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1994

Hernandi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintah Yang Baik, Dan Demokrasi di Indonesia*, Kencana Salakadomas, Bandung. 2013.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. 2015.

Lamintang & Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Anuansa Alia, Bandung. 2011.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Abadi. 1997.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993.

Muh Abdul Kadir, 2004. *Hukum Dan & Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP

Schaffmeister, keijzer & sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung. 2007

Soerjono Soekano, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Jurnal :

Supriyadi, *Mimbar Hukum*. Volume 22 Nomor 1. 2010.

Wiratraman, R. Herlambang W, 1 desember 2007, *Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945 : Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei. Volume 1.

Buku Bacaan :

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Ujaran Kebencian*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*

Peraturan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website :

<http://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-dan-pasal-156a-kuhp/>

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/02/02/76506/25/25/-Kemenristek-Ungkap-Ratusan-Ijazah-Palsu-Kepala-Daerah>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/06060001/Bermacam.Hal.yang.Perlu.Di.ketahui.soal.edaran.Kapolri.Tentang.Hate.Speech>

<http://news.okezone.com/read/2017/03/07/340/1635969/kasus-money-politic-di-pilkada-kabupaten-jayapura-harus-diusut-tuntas>

http://pkbi-diy.info/?page_id=3498

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56b9961d0e4ae/jerat-hukum-bagi-tetangga-yang-suka-menghina-suku>

<http://www.hukumonline.com/klinik/lt55e5e09798cb8/sengaja-menghasut-orang-lain-agar-bertengkar-bisakah-dipidana>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>